

Rencana Tindak Pengendalian Operasional Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2026



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

DAFTAR ISI

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)..... 1

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 1

I. PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Dasar Hukum1

 C. Maksud dan Tujuan.....2

 D. Ruang Lingkup.....3

II. SEKILAS TENTANG SPIP9

 A. Pengertian9

 B. Tujuan SPIP9

 C. Unsur-unsur SPIP9

 D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*).....12

III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....13

 A. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan13

 B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini13

 C. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian.....14

IV. PENILAIAN RISIKO15

 A. Penetapan Konteks Tujuan15

 B. Identifikasi Risiko.....19

 C. Analisis Risiko.....20

V. KEGIATAN PENGENDALIAN.....26

VI. INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....28

VII. PEMANTAUAN.....29

VIII. PENUTUP30

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan Negara / daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Kepala BPKP nomor 05 Tahun 2021 tentang penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.
4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
2. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

D. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

1. Lingkungan Pengendalian.

Lingkungan pengendalian adalah lingkungan dimana pengendalian tersebut berada, yaitu meliputi antara lain : seluruh personil baik atasan maupun bawahan, integritas, nilai etika dan kompetensi personil, manajerial, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, pengawasan oleh aparat pengawasan internal, dan hubungan antar instansi.

2. Penilaian Risiko.

Berbagai risiko organisasi dapat menghambat dan bahkan menggagalkan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, risiko perlu diidentifikasi dan dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

3. Kegiatan Pengendalian.

Kegiatan pengendalian mempunyai makna luas, yaitu segala upaya dan wujud yang dilakukan organisasi dalam rangka mengendalikan segala aktivitasnya agar tujuan dalam arti sempit dan luas (demensi waktu dan operasional) dapat terwujud secara efektif dan efisien. Segala upaya dan wujud sebagai manifestasi dari pengendalian intern tersebut didesain/dibangun berdasarkan penilaian risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi.

Informasi dan komunikasi antar personil baik atasan dengan bawahan, maupun dengan instansi lain serta stakeholders merupakan urat nadi dalam

organisasi. Efektivitas pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi dan komunikasi.

5. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan bukan hanya dilakukan terhadap aspek operasional dan keuangan saja, namun pemantauan juga dilakukan terhadap efektivitas dan kualitas pengendalian internnya. Pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan oleh atasan dan para personil organisasi. Efektivitas pengendalian intern perlu juga dievaluasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun pihak eksternal.

Penyusunan RTP Strategis Tahun 2025 - 2029 mengacu pada Tujuan Strategis serta Sasaran Strategis yang dilakukan identifikasi Risiko dalam rangka mitigasi keterjadian yang menghambat pencapaian target tersebut. Adapun tujuan dan sasaran strategis Dinas PU Kabupaten Banyumas pada Tahun 2025 – 2029 berdasarkan Renstra 2025 – 2029 dijabarkan menjadi Program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

I. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- 2) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- 3) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

II. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Unit pengolahan setempat
- 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- 3) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

III. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

A. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
- 2) Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

- 3) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- B. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 3) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 4) Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
 - 5) Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa
- IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
- A. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- 1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
 - 2) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
- B. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Penyusunan Peta Dasar
 - 2) Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
- C. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 2) Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
- D. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
 - 2) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
- V. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
- A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
- VI. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
- A. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- 1) Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

VII. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

A. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 2) Penggantian Jembatan
- 3) Rekonstruksi Jalan
- 4) Pemeliharaan Berkala Jalan
- 5) Pembangunan Jembatan
- 6) Pemeliharaan Berkala Jembatan
- 7) Pemeliharaan Rutin Jalan
- 8) Pemeliharaan Rutin Jembatan
- 9) Pembangunan Jalan

VIII. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

A. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- 1) Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
- 2) Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
- 3) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

B. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota

- C. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - 1) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
- IX. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
 - A. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- X. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - C. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan

pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terciptanya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko.

Tahapan penilaian sbb :

1. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
2. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.
3. Evaluasi risiko.

Tujuan Penilaian risiko untuk :

1. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal.
2. Menyusun peringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganan agar dapat dikelola secara efektif.

Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori yaitu : *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko. Kegiatan pengendalian juga dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Kegiatan monitoring terhadap kualitas kinerja pengendalian intern yang dilaksanakan berkelanjutan dan menyatu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan menggunakan kriteria pemantauan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan seperti kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, *Standard Operating Procedures* (SOP), dan lain-lain. Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

A. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Unsur lingkungan pengendalian merupakan landasan dasar dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk :

- 1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- 2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- 3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- 4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- 8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas yang merujuk pada :

- 1. Sesuai Laporan Hasil Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas oleh BPKP, Nomor PE.05.03/LHP-453/PW11/5.2/2023, Tgl. 20 Juli 2023 dan
- 2. Surat Inpektorat Daerah Kabupaten Banyumas nomor R.PKPT/078/700/III/2025 tentang LHR RTP Tahun 2025 dan Evaluasi RTP Tahun 2024 pada Dinas PU.

Maka diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai

No	Sub Unsur	Kondisi
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Kurang Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Memadai

Sumber : aplikasi MRI Pemkab banyumas, Form 1c

C. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas dan Etika	- Pembinaan dan Rapat pengendalian secara rutin, terutama di level eselon III selaku koordinator di setiap sub Urusan
III	Kepemimpinan yang Kondusif	- Perbaikan kebijakan dan Prosedur perencanaan dan dokumen penganggaran agar sesuai SOP
VII	Perwujudan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Efektif.	- Perbaikan kebijakan dan Prosedur pengendalian berupa Penyusunan Dokumen RTP sesuai ketentuan

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran :
Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas PU Kabupaten Banyumas
Form 1.c : Simpulan FGD Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas PU Kabupaten Banyumas .

IV. PENILAIAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam upaya mendukung pemeeerintah kabupaten banyumas dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 sebagai landasan yang akan digunakan oleh Bupati Banyumas sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029 yang disesuaikan dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD yaitu **“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan enam misi pembangunan daerah, yaitu ;

1. Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
2. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah
3. Meningkatnya ketahanan pangan
4. Meningkatnya pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berdaya saing
6. Meningkatnya keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas memiliki peran utama dalam mendukung Misi ke-4, yaitu: meningkatnya pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, serta turut mendukung Misi lainnya terkait ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani serta transparan.

Pada tahun 2025-2029, Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang disusun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas diprioritaskan untuk pengendalian dalam rangka mencapai tujuan Dinas PU yaitu Meningkatnya kinerja infrastruktur, dan sasaran sasaran sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah
- 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum

Sedangkan program-program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 6. Program Penataan Bangunan Gedung
- 7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- 8. Program Penyelenggaraan Jalan
- 9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 10. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
- 11. Program Pengembangan Permukiman
- 12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan konteks risiko Operasional Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani SPAM di Tahun n Target : 2150 Sambungan Rumah (SR)
		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon) Target : 2150 Rumah Tangga
		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023) (Bukan Jaringan Perpipaan) Target : 100 Rumah Tangga
		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja
		60 liter/orang/hari (4 galon) Target : 100 Rumah Tangga
		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023) Target : 2150 Rumah Tangga
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan air limbah Target : 30 Lokasi Jumlah layanan publik sedot tinja dan mobil toilet yang disediakan Target : 360 Kali Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik Target : 1650 Rumah Tangga Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota Target : - Rumah Tangga Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota Target : 40125 Rumah Tangga Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar Target : 40125 Rumah Tangga
3	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Air Baku ditangani Target : 5 Unit Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun, ditingkatkan dan dipelihara Target : 7,05 Km
4	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Target : 56,5 %
5	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapkan Target : 2 Dokumen

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun Target : 2 Dokumen
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang Target : 780 Dokumen
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan Target : 60 Kegiatan
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara Target : 3500 Meter
10	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun, dipelihara dan diubahsuai Target : 25 Unit
11	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang dilaksanakan Target : 2 Kawasan
12	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten yang dibangun dan ditingkatkan Target : 24,08 Km Panjang jalan kabupaten yang dipelihara Target : 120 Km
13	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Operator dan Teknisi atau Analis Konstruksi	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Target : 2 Kegiatan
14	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten yang dikelola Target : 1 Dokumen
15	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Target : 1 Dokumen
16	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur pengelolaan persampahan yang tersedia Target : 11 Rumah Tangga
17	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman Strategis yang dibangun Target : - Unit
18	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah Target : 100 % Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA Target : 100 %
19	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Target : 100 % Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD) Target : 100 %
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Target : 100 %

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran Form 2.c :
Penetapan konteks risiko operasional Dinas PU

B. Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani.

Tujuan DPU : **Meningkatnya Kinerja infrastruktur**

Risiko Operasional :

1. Pelaporan jumlah sambungan rumah lebih tinggi dari realisasi (over-reporting) untuk memperbesar pencapaian atau anggaran
2. Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL Air Minum (FRA resiko kecurangan)
3. Realisasi penanganan air limbah tidak riil dengan kondisi dilapangan
4. Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA resiko kecurangan)
5. kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase belum mencukupi kebutuhan penanganan kerusakan. Sedangkan pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan masih belum mampu mengurangi luas genangan
6. Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Bangunan Gedung akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Serta Perencanaan Teknis)
7. Kurangnya jumlah Infrastruktur pengelolaan persampahan
8. Terhambatnya pelaksanaan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya karena tidak tersedia lahan
9. Terhambatnya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing akibat Cuaca ekstrem, lokasi hasil survey tidak sesuai usulan, tumpang tindih kewenangan
10. Kurang optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi akibat Kerusakan jaringan tinggi, prioritas anggaran, SDM yang belum sesuai kebutuhan
11. Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik dan penurunan kualitas pekerjaan jalan
12. Tidak tersedia lahan untuk pembangunan jalan / jembatan
13. Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan
14. Dokumen RTRW/RRTR disusun dengan data dan analisis yang tidak akurat sehingga memuat ketentuan yang tidak sesuai kondisi lapangan
15. Dokumen rencana tata ruang dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu yang berpotensi merugikan kepentingan umum
16. Penerbitan KKPR berdasarkan data fiktif atau manipulasi informasi pemohon (FRA)

- 17. Petugas pengawasan menerima gratifikasi atau intervensi sehingga pelanggaran tata ruang tidak ditindak (FRA)
- 18. Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil dalam pelatihan / pembinaan Jasa konstruksi
- 19. Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten tidak dikelola dengan baik
- 20. Tidak seluruh kegiatan Konstruksi diawasi
- 21. Perubahan prioritas pembangunan lintas sektor yang tidak diikuti pembaruan dokumen perencanaan
- 22. Terdapat program Renja yang tidak mendapat alokasi anggaran
- 23. Perbedaan metode kerja pada bidang / Unit baru
- 24. Sistem kearsipan tidak terintegrasi
- 25. Pengadaan barang berdasarkan kebutuhan lapangan yang bersifat mendesak, seringkali belum terakomodir dalam RKBMD
- 26. Tenaga jasa penunjang tidak memiliki keterampilan sesuai kebutuhan teknis
- 27. Penggantian barang baru dengan barang bekas berkualitas rendah (FRA)
- 28. Pencatatan perawatan fiktif pada kendaraan yang tidak dipelihara (FRA)
- 29. Perubahan format pelaporan keuangan yang tidak segera disosialisasikan
- 30. Penyampaian SPJ dengan bukti fiktif agar pencairan dana tahap berikutnya lancar (FRA)

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 3.c Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD.

C. Analisis Risiko

1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui FGD. Dari hasil FGD tersebut diperoleh informasi sebagai berikut :

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Pelaporan jumlah sambungan rumah lebih tinggi dari realisasi (over-reporting) untuk memperbesar pencapaian atau anggaran	ROO.26	1.03	01	01	3,00	3,00	9,00
2	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL Air Minum (FRA resiko kecurangan)	ROO.26	1.03	01	02	5,00	1,00	5,00

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
3	Realisasi penanganan air limbah tidak riil dengan kondisi dilapangan	ROO.26	1.03	02	01	3,00	3,00	9,00
4	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA resiko kecurangan)	ROO.26	1.03	02	02	5,00	1,00	5,00
5	kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase belum mencukupi kebutuhan penanganan kerusakan. Sedangkan pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan masih belum mampu mengurangi luas genangan	ROO.26	1.03	03	01	4,00	3,00	12,00
6	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Bangunan Gedung akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Serta Perencanaan Teknis)	ROO.26	1.03	04	01	3,00	3,00	9,00
7	Kurangnya jumlah Infrastruktur pengelolaan persampahan	ROO.26	1.03	05	01	4,00	3,00	12,00
8	Terhambatnya pelaksanaan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya karena tidak tersedia lahan	ROO.26	1.03	06	01	4,00	2,00	8,00
9	Terhambatnya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing akibat Cuaca ekstrem, lokasi hasil survey tidak sesuai usulan, tumpang tindih kewenangan	ROO.26	1.03	06	02	3,00	4,00	12,00
10	Kurang optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi akibat Kerusakan jaringan tinggi, prioritas anggaran, SDM yang belum sesuai kebutuhan	ROO.26	1.03	07	01	3,00	3,00	9,00
11	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik dan penurunan kualitas pekerjaan jalan	ROO.26	1.03	08	01	5,00	3,00	20,00
12	Tidak tersedia lahan untuk pembangunan jalan / jembatan	ROO.26	1.03	08	02	3,00	2,00	6,00
13	Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	ROO.26	1.03	08	03	3,00	3,00	9,00

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
14	Dokumen RTRW/RRTR disusun dengan data dan analisis yang tidak akurat sehingga memuat ketentuan yang tidak sesuai kondisi lapangan	ROO.26	1.03	09	01	5,00	1,00	5,00
15	Dokumen rencana tata ruang dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu yang berpotensi merugikan kepentingan umum	ROO.26	1.03	09	02	3,00	3,00	9,00
16	Penerbitan KKPR berdasarkan data fiktif atau manipulasi informasi pemohon (FRA)	ROO.26	1.03	09	03	5,00	1,00	5,00
17	Petugas pengawasan menerima gratifikasi atau intervensi sehingga pelanggaran tata ruang tidak ditindak (FRA)	ROO.26	1.03	09	04	5,00	1,00	5,00
18	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil dalam pelatihan / pembinaan Jasa konstruksi	ROO.26	1.03	10	01	3,00	4,00	12,00
19	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten tidak dikelola dengan baik	ROO.26	1.03	10	02	3,00	3,00	9,00
20	Tidak seluruh kegiatan Konstruksi diawasi	ROO.26	1.03	10	03	3,00	4,00	12,00
21	Perubahan prioritas pembangunan lintas sektor yang tidak diikuti pembaruan dokumen perencanaan	ROO.26	1.03	11	01	4,00	2,00	8,00
22	Terdapat program Renja yang tidak mendapat alokasi anggaran	ROO.26	1.03	11	02	3,00	3,00	9,00
23	Perbedaan metode kerja pada bidang / Unit baru	ROO.26	1.03	12	01	3,00	3,00	9,00
24	Sistem kearsipan tidak terintegrasi	ROO.26	1.03	12	02	3,00	3,00	9,00
25	Pengadaan barang berdasarkan kebutuhan lapangan yang bersifat mendesak, seringkali belum terakomodir dalam RKBMD	ROO.26	1.03	12	03	3,00	4,00	12,00
26	Tenaga jasa penunjang tidak memiliki keterampilan sesuai kebutuhan teknis	ROO.26	1.03	12	04	3,00	3,00	9,00
27	Penggantian barang baru dengan barang bekas berkualitas rendah (FRA)	ROO.26	1.03	12	05	5,00	1,00	5,00
28	Pencatatan perawatan fiktif pada kendaraan yang tidak dipelihara (FRA)	ROO.26	1.03	12	06	5,00	1,00	5,00

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
29	Perubahan format pelaporan keuangan yang tidak segera disosialisasikan	ROO.26	1.03	13	01	4,00	2,00	8,00
30	Penyampaian SPJ dengan bukti fiktif agar pencairan dana tahap berikutnya lancar (FRA)	ROO.26	1.03	13	02	5,00	1,00	5,00

Level Risiko	Besaran Risiko
Sangat Tinggi	20-25
Tinggi	16-19
sedang	12-15
Rendah	6-11
sangat Rendah	1 - 5

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 4c: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Operasional.

2. Validasi Risiko

Dari hasil analisis risiko, tidak terdapat risiko dengan level sangat tinggi, namun terdapat risiko sangat tinggi dan sedang yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Dinas PU membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 5C Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.

3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Sampai dengan saat ini, di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan SID pada setiap lokasi penanganan
- 2. DPA Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- 3. Pembentukan tim pelaksana kegiatan
- 4. Rapat Pra Construction Meeting (PCM)
- 5. Pembuatan jadwal pembinaan jasa konstruksi sesuai kebutuhan
- 6. Dokumen RKBMD

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya

penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.

Kegiatan pengendalian yang sudah ada yang masih perlu dibutuhkan :

1. Survei lokasi dengan berkoordinasi ataupun mengikutsertakan pengusul/perangkat desa
2. Menyusun dokumen DED TPST di Area Purwokerto
3. Rapat persiapan pengadaan barang jasa
4. Rapat evaluasi pekerjaan fisik
5. Sosialisasi jadwal pembinaan jasa konstruksi
6. Penyusunan Perubahan RKBMD sebelum perubahan APBD ditetapkan

4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

A. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, Form 6 (kolom f – h).

B. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (Avoid)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (Abate)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (Mitigate)
- d. Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (Accept/Retain)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian

tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, Form 7 (kolom g – i).

C. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

D. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I Form 8 (kolom a – f).

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

E. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I Form 9 (kolom a – e).

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

V. KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas PU berpedoman pada peraturan-peraturan, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 08 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Menyusun Tim untuk kegiatan/pekerjaan khusus dalam bentuk Surat Keputusan seperti PA, KPA/PPK, PPTK, Sekgit, Pengawas Lapangan, Pejabat Pengadaan dll.;
2. Pendataan dan pembinaan kepada Pegawai yang ada sesuai tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan kegiatan fisik sesuai skala prioritas;
4. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap kegiatan;
5. Memasang standing banner terutama kegiatan-kegiatan strategis per bidang pengelola.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2026 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, Form 6 dan 7.

VI. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP yang meliputi:

1. Survei lapangan dan rapat koordinasi
2. Rapat Koordinasi
3. Sosialisasi / banner / website / medsos

VII. PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, Form 9 (kolom f dan g).

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k).

VIII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional ini menjadi *instrument* untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/ pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Purwokerto, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Banyumas



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST, M.Si.

NIP. 19671229 199002 1 002

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Banyumas

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas			
Tahun Penilaian	: 2025			
Periode Yang dinilai	: RD 2025-2029			
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kinerja infrastruktur			
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Laporan Hasil Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas oleh BPKP, Nomor PE.05.03/LHP-453/PW11/5.2/2023, Tgl. 20 Juli 2023	Terdapat 24 risiko Fraud pada Dinas Pekerjaan Umum, meliputi Risiko Benturan kepentingan = 8; Risiko Gratifikasi = 2; Risiko Penggelapan Dalam Jabatan = 1; Risiko Suap Menyuap = 1; Risiko Perbuatan Curang = 1; Risiko Perbuatan Merugikan Negara = 1;	Sudah terdapat pengendalian pada seluruh risiko yang teridentifikasi, dan hanya 2 risiko dengan pengendalian terpasang yang statusnya belum/kurang memadai.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
2	Surat Inpektorat Daerah Kabupaten Banyumas nomor R.PKPT/078/700/III/2025LHR RTP Tahun 2025 dan Evaluasi RTP Tahun 2024 pada Dinas PU.	a. komponen perencanaan kinerja : 1) Tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belum sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku; 2) Belum optimalnya perencanaan dengan kinerja yang ingin dicapai kepada seluruh pegawai di Dinas Pekerjaan Umum; 3) Dalam internalisasi kinerja pengambilan keputusan belum memperhatikan memanfaatkan analisis perbaikan kinerja; b. Belum optimalnya internalisasi SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai di lingkungan dan hasil Dinas Pekerjaan Umum; c. komponen pelaporan kinerja: 1) Belum optimalnya pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala oleh Pimpinan; 2) Belum optimalnya internalisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum kepada seluruh pegawai; d. Belum optimalnya memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal.	Dokumen RTP tahun sebelumnya sudah tersusun sebagai salah satu instrumen bagi pimpinan dalam melaksanakan pengendalian	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
3	Surat Inpektorat Daerah Kabupaten Banyumas nomor R.PKPT/078/700/III/2025 tentang LHR RTP Tahun 2025 dan Evaluasi RTP Tahun 2024 pada Dinas PU.	Lingkungan Pengendalian Belum Sepenuhnya Tepat; Identifikasi Risiko Kecurangan dan Kemitraan belum Optimal; Selera Kebijakan berdasarkan Sampling; Rencana atau Jadwal kegiatan Informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat; Keterlambatan penyusunan dan penetapan RTP	Penyajian dokumen RTP Tahun sebelumnya telah mengacu pada standar dan ketentuan yang berlaku	PERWUJUDAN APIP YANG EFEKTIF

Simpulan FGD Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Banyumas

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas						
Tahun Penilaian	: 2025						
Periode Yang dinilai	: RD 2025-2029						
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kinerja infrastruktur						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
N O	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil FGD		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	- Terdapat 24 risiko Fraud pada Dinas Pekerjaan Umum, meliputi Risiko Benturan kepentingan = 8; Risiko Gratifikasi = 2; Risiko Penggelapan Dalam Jabatan = 1; Risiko Suap Menyuap = 1; Risiko Perbuatan Curang = 1; Risiko Perbuatan Merugikan Negara = 1;	Kurang Memadai		Kurang Memadai	Sesuai Laporan Hasil Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas oleh BPKP, Nomor PE.05.03/LHP-453/PW11/5.2/2023, Tgl. 20 Juli 2023
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-	-	Memadai		-	
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Memadai	a. komponen perencanaan kinerja : 1) Tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belum sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku; 2) Belum optimalnya perencanaan dengan kinerja yang ingin dicapai kepada seluruh pegawai di Dinas Pekerjaan Umum; 3) Dalam internalisasi kinerja pengambilan keputusan belum memperhatikan memanfaatkan analisis perbaikan kinerja; b. Belum optimalnya internalisasi SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai di lingkungan dan hasil Dinas Pekerjaan Umum; c. komponen pelaporan kinerja: 1) Belum optimalnya pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala oleh Pimpinan; 2) Belum optimalnya internalisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum kepada seluruh pegawai; d. Belum optimalnya memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal.	Kurang Memadai		Kurang Memadai	Sesuai dengan Surat Inpektorat Daerah Kabupaten Banyumas nomor R.PKPT/078/700/III/2025 tentang LHR RTP Tahun 2025 dan Evaluasi RTP Tahun 2024 pada Dinas PU.
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	-	-	Memadai		-	

N O	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil FGD		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	Kurang Memadai	Lingkungan Pengendalian Belum Sepenuhnya Tepat; Identifikasi Risiko Kecurangan dan Kemitraan belum Optimal; Selera Kebijakan berdasarkan Sampling; Rencana atau Jadwal kegiatan Informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat; Keterlambatan penyusunan dan penetapan RTP	Kurang Memadai		Kurang Memadai	Sesuai dengan Surat Inpektorat Daerah Kabupaten Banyumas nomor R.PKPT/078/700/III/2025 tentang LHR RTP Tahun 2025 dan Evaluasi RTP Tahun 2024 pada Dinas PU.
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Banyumas

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Yang dinilai	: 2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: Dinas PU
Sumber Data	: Renstra 2025-2029
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kinerja infrastruktur
Program OPD (Renja 2026) dan Kegiatan Utama	A. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	B. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	C. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	D. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	E. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	F. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	G. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
	H. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	I. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Keluaran/Hasil Kegiatan	
	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kab/Kota
	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD di Daerah Kab/Kota
	Meningkatnya jumlah penanganan Bangunan penyedia Air Baku dan Pengamanan wilayah aliran sungai rawan longsor dan Banjir
	Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya kualitas bangunan pelengkap jalan
	Meningkatnya Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
	Meningkatnya Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya
	Meningkatnya panjang jalan kabupaten dibangun ditingkatkan dan dipelihara
	Meningkatnya jumlah pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan
	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten
	Terlaksananya Pengawasan Jasa Konstruksi
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur persampahan
	Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Permukiman Strategis
	Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah
	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah
	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Informasi Lain	-

Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani SPAM di Tahun n Target : 2150 Sambungan Rumah (SR)
		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon) Target : 2150 Rumah Tangga
		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023) (Bukan Jaringan Perpipaan) Target : 100 Rumah Tangga
		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon) Target : 100 Rumah Tangga
		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023) Target : 2150 Rumah Tangga
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan air limbah Target : 30 Lokasi
		Jumlah layanan publik sedot tinja dan mobil toilet yang disediakan Target : 360 Kali
		Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik Target : 1650 Rumah Tangga
		Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota Target : - Rumah Tangga
		Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota Target : 40125 Rumah Tangga
		Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar Target : 40125 Rumah Tangga
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Air Baku ditangani Target : 5 Unit
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun, ditingkatkan dan dipelihara Target : 7,05 Km
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Target : 56,5 %
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapkan Target : 2 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun Target : 2 Dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang Target : 780 Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan Target : 60 Kegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara Target : 3500 Meter
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun, dipelihara dan diubahsuai Target : 25 Unit
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang dilaksanakan Target : 2 Kawasan
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten yang dibangun dan ditingkatkan Target : 24,08 Km
	Panjang jalan kabupaten yang dipelihara Target : 120 Km
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Operator dan Teknisi atau Analis Konstruksi	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Target : 2 Kegiatan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten yang dikelola Target : 1 Dokumen
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Target : 1 Dokumen
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur pengelolaan persampahan yang tersedia Target : 11 Rumah Tangga
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman Strategis yang dibangun Target : - Unit
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah Target : 100 %
	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA Target : 100 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Target : 100 %
	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD) Target : 100 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Target : 100 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian rencana kebutuhan Barang Milik Daerah dengan pengadaan Barang Milik Daerah Target : 43 %
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Target : 100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Target : 95 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik Target : 60 %
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Target : 100 %

Purwokerto, 31 Desember 2025

KEPALA Dinas PU
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO,ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671229 199002 1 002

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Program	C	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)											
Ind Program			1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota									
Ind Program			2	Persentase Bangunan Penyedia Air Baku Dalam Kondisi Baik									
Ind Program			3	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
Ind Program			4	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi									
Kegiatan	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan			1	Jumlah Bangunan Air Baku ditangani	Terhambatnya pelaksanaan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya karena tidak tersedia lahan		Kepala Bidang Sumber Daya Air, Air Limbah dan Air Minum	Tidak tersedia lahan	Internal	C	Pembangunan embung batal dilaksanakan	Masyarakat, Pemerintah Daerah	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Ind Kegiatan			1	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan	Petugas pengawasan menerima gratifikasi atau intervensi sehingga pelanggaran tata ruang tidak ditindak (FRA)		Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi	Lemahnya sistem pelaporan dan mekanisme pengawasan independen	Internal	C	Pelanggaran tata ruang meningkat, menurunkan kepercayaan publik	Masyarakat, Pemerintah Daerah	
Ind Sasaran				Persentase Masyarakat jasa konstruksi yang dibina									
Program	I	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI											
			1	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil yang dilatih									
Ind Program			2	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi									
Ind Program			3	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi									
Kegiatan	1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Operator dan Teknisi atau Analis Konstruksi											
Ind Kegiatan			1	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil dalam pembinaan / pembinaan Jasa konstruksi		Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi	Kurangnya minat tenaga terampil untuk ikut pelatihan / pembinaan Jasa konstruksi yang diselenggarakan Dinas PU Kab.	Eksternal	C	Banyak tenaga terampil konstruksi yang tidak memenuhi kualifikasi	Masyarakat, Penyedia Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah	

[illegible]

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
			1	IKM Perangkat Daerah□									
Ind Program			2	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah□									
Ind Program			3	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi									
Ind Program			4	Nilai kematangan organisasi									
Ind Program			5	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Kegiatan	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah□											
Ind Kegiatan			1	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	Perubahan prioritas pembangunan lintas sektor yang tidak diikuti pembaruan dokumen perencanaan		Sekretaris	Belum ada mekanisme sinkronisasi cepat antara Renja dan Renstra	Internal	C	Program/kegiatan berjalan tidak sesuai arah strategis	Dinas PU, Pemerintah Daerah	
Ind Kegiatan			2	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	Terdapat program Renja yang tidak mendapat alokasi anggaran		Sekretaris	KUA PPAS tidak sesuai dengan Renja	Internal	C	Capaian kinerja tidak sesuai rencana (terlalu rendah / terlalu tinggi) pada beberapa Program	Dinas PU, Pemerintah Daerah	
Kegiatan	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah□											
Ind Kegiatan			1	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perbedaan metode kerja pada bidang / Unit baru		Sekretaris	Bidang yang bergabung maupun berpindah dari OPD lain, sehingga pola kerja belum sepenuhnya selaras	Internal	C	Pelaksanaan administrasi kegiatan belum maksimal	Dinas PU, Pemerintah Daerah	

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Ind Kegiatan			2	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Sistem kearsipan tidak terintegrasi		Sekretaris	Arsip disimpan dengan format dan metode yang berbeda-beda	Internal	C	Sulit mencari dokumen untuk kebutuhan pelayanan atau audit	Dinas PU, Pemerintah Daerah	
Kegiatan	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah□											
Ind Kegiatan			1	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	Pengadaan barang berdasarkan kebutuhan lapangan yang bersifat mendesak, seringkali belum terakomodir dalam RKBMD		Sekretaris	Lemahnya pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang	Internal	C	Barang tidak sesuai kebutuhan, harga tidak wajar	Dinas PU, Pemerintah Daerah	
Kegiatan	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah□											
Ind Kegiatan			1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah□	Tenaga jasa penunjang tidak memiliki keterampilan sesuai kebutuhan teknis		Sekretaris	Rekrutmen dan evaluasi penyedia jasa tidak berbasis kompetensi	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan operasional OPD	Dinas PU, Pemerintah Daerah	
Kegiatan	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah□											
Ind Kegiatan			1	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik□	Penggantian barang baru dengan barang bekas berkualitas rendah (FRA)		Sekretaris	Tidak ada pemeriksaan fisik menyeluruh saat penerimaan barang	Internal	C	Penurunan umur pakai aset, potensi kerugian daerah	Dinas PU, Pemerintah Daerah	
Ind Kegiatan			2	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah□	Pencatatan perawatan fiktif pada kendaraan yang tidak dipelihara (FRA)		Sekretaris	Kolusi antara pihak bengkel dengan pemakai kendaraan dengan pihak bengkel	Internal	C	Kerusakan pada aset BMD	Dinas PU, Pemerintah Daerah	

[illegible]

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Banyumas						
Tahun Penilaian		: 2025						
Periode yang dinilai		: 2026						
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kinerja infrastruktur						
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Pelaporan jumlah sambungan rumah lebih tinggi dari realisasi (over-reporting) untuk memperbesar pencapaian atau anggaran	ROO.26	1.03	01	01	3,00	3,00	9,00
2	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL Air Minum (FRA resiko kecurangan)□	ROO.26	1.03	01	02	5,00	1,00	5,00
3	Realisasi penanganan air limbah tidak riil dengan kondisi dilapangan	ROO.26	1.03	02	01	3,00	3,00	9,00
4	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA resiko kecurangan)□	ROO.26	1.03	02	02	5,00	1,00	5,00
5	kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase belum mencukupi kebutuhan penanganan kerusakan. Sedangkan pembangunan,	ROO.26	1.03	03	01	4,00	3,00	12,00
6	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Bangunan Gedung akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Serta Perencanaan Teknis)	ROO.26	1.03	04	01	3,00	3,00	9,00
7	Kurangnya jumlah Infrastruktur pengelolaan persampahan	ROO.26	1.03	05	01	4,00	3,00	12,00
8	Terhambatnya pelaksanaan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya karena tidak tersedia lahan	ROO.26	1.03	06	01	4,00	2,00	8,00
9	Terhambatnya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing akibat Cuaca ekstrem, lokasi hasil survey tidak sesuai usulan, tumpang tindih kewenangan	ROO.26	1.03	06	02	3,00	4,00	12,00
10	Kurang optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi akibat Kerusakan jaringan tinggi, prioritas anggaran, SDM yang belum sesuai kebutuhan	ROO.26	1.03	07	01	3,00	3,00	9,00
11	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik dan penurunan kualitas pekerjaan jalan	ROO.26	1.03	08	01	5,00	4,00	20,00
12	Tidak tersedia lahan untuk pembangunan jalan / jembatan	ROO.26	1.03	08	02	3,00	2,00	6,00
13	Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	ROO.26	1.03	08	03	3,00	3,00	9,00
14	Dokumen RTRW/RRTR disusun dengan data dan analisis yang tidak akurat sehingga memuat ketentuan yang tidak sesuai kondisi lapangan	ROO.26	1.03	09	01	5,00	1,00	5,00
15	Dokumen rencana tata ruang dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu yang berpotensi merugikan kepentingan umum	ROO.26	1.03	09	02	3,00	3,00	9,00

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
16	Penerbitan KKPR berdasarkan data fiktif atau manipulasi informasi pemohon (FRA)	ROO.26	1.03	09	03	5,00	1,00	5,00
17	Petugas pengawasan menerima gratifikasi atau intervensi sehingga pelanggaran tata ruang tidak ditindak (FRA)	ROO.26	1.03	09	04	5,00	1,00	5,00
18	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil dalam pelatihan / pembinaan Jasa konstruksi	ROO.26	1.03	10	01	3,00	4,00	12,00
19	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten tidak dikelola dengan baik	ROO.26	1.03	10	02	3,00	3,00	9,00
20	Tidak seluruh kegiatan Konstruksi diawasi	ROO.26	1.03	10	03	3,00	3,00	9,00
21	Perubahan prioritas pembangunan lintas sektor yang tidak diikuti pembaruan dokumen perencanaan	ROO.26	1.03	11	01	4,00	2,00	8,00
22	Terdapat program Renja yang tidak mendapat alokasi anggaran	ROO.26	1.03	11	02	3,00	3,00	9,00
23	Perbedaan metode kerja pada bidang / Unit baru	ROO.26	1.03	12	01	3,00	3,00	9,00
24	Sistem kearsipan tidak terintegrasi	ROO.26	1.03	12	02	3,00	3,00	9,00
25	Pengadaan barang berdasarkan kebutuhan lapangan yang bersifat mendesak, seringkali belum terakomodir dalam RKBMD	ROO.26	1.03	12	03	3,00	4,00	12,00
26	Tenaga jasa penunjang tidak memiliki keterampilan sesuai kebutuhan teknis	ROO.26	1.03	12	04	3,00	3,00	9,00
27	Penggantian barang baru dengan barang bekas berkualitas rendah (FRA)	ROO.26	1.03	12	05	5,00	1,00	5,00
28	Pencatatan perawatan fiktif pada kendaraan yang tidak dipelihara (FRA)	ROO.26	1.03	12	06	5,00	1,00	5,00
29	Perubahan format pelaporan keuangan yang tidak segera disosialisasikan	ROO.26	1.03	13	01	4,00	2,00	8,00
30	Penyampaian SPJ dengan bukti fiktif agar pencairan dana tahap berikutnya lancar (FRA)	ROO.26	1.03	13	02	5,00	1,00	5,00

Keterangan

Level Risiko	Besaran risiko	Warna
Sangat Tinggi	20 - 25	
Tinggi	16 - 19	
Sedang	12 - 15	
Rendah	6 - 11	
Sangat Rendah	1 - 5	

**FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Banyumas									
Tahun Penilaian		: 2025									
Periode yang dinilai		: 2026									
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kinerja infrastruktur									
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Pelaporan jumlah sambungan rumah lebih tinggi dari realisasi (over-reporting) untuk memperbesar pencapaian atau anggaran	ROO.26	1.03	01	01	9,00	Kepala Bidang SDAALAM	Tidak adanya verifikasi lapangan dan pembacaan meter secara acak	Potensi kerugian negara, target program tidak tercapai, reputasi instansi menurun
2	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL Air Minum (FRA resiko kecurangan) ☐	ROO.26	1.03	01	02	5,00	Kepala Bidang SDAALAM	Tekanan Pihak Eksternal dan Internal ☐	Pegawai TFL tidak memenuhi Standar kualifikasi yang dibutuhkan ☐
3	Realisasi penanganan air limbah tidak riil dengan kondisi dilapangan	ROO.26	1.03	02	01	9,00	Kepala Bidang SDAALAM	sumber data penerima bantuan dan jumlah yang belum terlayani terlalu bias	sulit untuk menetapkan prioritas kegiatan
4	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA resiko kecurangan) ☐	ROO.26	1.03	02	02	5,00	Kepala Bidang SDAALAM	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tarif perda retribusi ☐	Timbulnya presepsi KKN dari masyarakat kepada pemerintah ☐
5	kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase belum mencukupi kebutuhan penanganan kerusakan. Sedangkan pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan masih belum mampu mengurangi luas genangan	ROO.26	1.03	03	01	12,00	Kepala Bidang Jalan dan Drainase	Anggaran OP Drainase rendah; Pemanfaatan Drainase yang belum sesuai desain awal (drainase Jalan dimanfaatkan juga untuk drainase pemukiman)	Meningkatnya wilayah genangan
6	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Bangunan Gedung akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Serta Perencanaan Teknis)	ROO.26	1.03	04	01	9,00	Kepala Bidang PBPBLPP	Kurang teliti, terbatasnya tenaga teknis/SDM yang ahli, dukungan sarpras yang kurang memadai, Overload pekerjaan.	Banyaknya kendala dalam pelaksanaan, Evaluasi, pelaporan
7	Kurangnya jumlah Infrastruktur pengelolaan persampahan	ROO.26	1.03	05	01	12,00	Bidang BGPBLPP	Data infrastruktur sampah belum tersedia akibat perubahan SOTK	Layanan pengelolaan sampah terganggu
8	Terhambatnya pelaksanaan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya karena tidak tersedia lahan	ROO.26	1.03	06	01	8,00	Kepala Bidang SDAALAM	Tidak tersedia lahan	Pembangunan embung batal dilaksanakan
9	Terhambatnya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing akibat Cuaca ekstrem, lokasi hasil survey tidak sesuai usulan, tumpang tindih kewenangan	ROO.26	1.03	06	02	12,00	Kepala Bidang SDAALAM	Cuaca ekstrem; lokasi hasil survey tidak sesuai usulan; tumpang tindih kewenangan	Terjadinya bencana longsor

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
10	Kurang optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi akibat Kerusakan jaringan tinggi, prioritas anggaran, SDM yang belum sesuai kebutuhan	ROO.26	1.03	07	01	9,00	Kepala Bidang SDAALAM	Kerusakkan jaringan tinggi; prioritas anggaran; SDM kurang mencukupi, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi kurang maksimal karena belum memenuhi AKNPI	Produksi pertanian menurun
11	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik dan penurunan kualitas pekerjaan jalan	ROO.26	1.03	08	01	20,00	Bidang Jalan dan Drainase	Cuaca, mutu material dan waktu pelaksanaan	Pembangunan jalan tidak sesuai rencana (kualitas, kuantitas dan target waktu)
12	Tidak tersedia lahan untuk pembangunan jalan / jembatan	ROO.26	1.03	08	02	6,00	Bidang Jalan dan Drainase	Lahan milik Pemda terbatas; Mayoritas jalan berada di antara lahan warga.	Mayarakat tertunda untuk mendapatkan layanan transportasi
13	Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	ROO.26	1.03	08	03	9,00	Bidang Jalan dan Drainase	kerusakan jalan/jembatan tinggi dan sporadis; SDM (pengamat jalan) terbatas;	Kegiatan masyarakat terganggu
14	Dokumen RTRW/RRTR disusun dengan data dan analisis yang tidak akurat sehingga memuat ketentuan yang tidak sesuai kondisi lapangan	ROO.26	1.03	09	01	5,00	Kepala Bidang PRJK	Data spasial tidak mutakhir, minim survei lapangan	Terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang, potensi konflik antar pengguna lahan
15	Dokumen rencana tata ruang dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu yang berpotensi merugikan kepentingan umum	ROO.26	1.03	09	02	9,00	Kepala Bidang PRJK	Minimnya keterlibatan publik dalam proses perencanaan	Rencana tata ruang tidak mengakomodasi kebutuhan masyarakat, menimbulkan keberatan atau gugatan
16	Penerbitan KKPR berdasarkan data fiktif atau manipulasi informasi pemohon (FRA)	ROO.26	1.03	09	03	5,00	Kepala Bidang PRJK	Kurangnya verifikasi lapangan dan pengecekan keabsahan dokumen	Pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukan, berpotensi sengketa
17	Petugas pengawasan menerima gratifikasi atau intervensi sehingga pelanggaran tata ruang tidak ditindak (FRA)	ROO.26	1.03	09	04	5,00	Kepala Bidang PRJK	Lemahnya sistem pelaporan dan mekanisme pengawasan independen	Pelanggaran tata ruang meningkat, menurunkan kepercayaan publik
18	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil dalam pelatihan / pembinaan Jasa konstruksi	ROO.26	1.03	10	01	12,00	Kepala Bidang PRJK	Kurangnya minat tenaga terampil untuk ikut pelatihan / pembinaan Jasa konstruksi yang diselenggarakan Dinas PU Kab. Banyumas	Banyak tenaga terampil konstruksi yang tidak memenuhi kualifikasi
19	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten tidak dikelola dengan baik	ROO.26	1.03	10	02	9,00	Kepala Bidang PRJK	Belum ada penunjukan pengelola aplikasi	Kualitas Jasa Konstruksi menurun
20	Tidak seluruh kegiatan Konstruksi diawasi	ROO.26	1.03	10	03	9,00	Kepala Bidang PRJK	Belum ada pengawasan langsung ke lapangan	Kualitas pekerjaan Konstruksi menurun
21	Perubahan prioritas pembangunan lintas sektor yang tidak diikuti pembaruan dokumen perencanaan	ROO.26	1.03	11	01	8,00	Sekretaris Dinas PU	Belum ada mekanisme sinkronisasi cepat antara Renja dan Renstra	Program/kegiatan berjalan tidak sesuai arah strategis
22	Terdapat program Renja yang tidak mendapat alokasi anggaran	ROO.26	1.03	11	02	9,00	Sekretaris Dinas PU	KUA PPAS tidak sesuai dengan Renja	Capaian kinerja tidak sesuai rencana (terlalu rendah / terlalu tinggi) pada beberapa Program

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
23	Perbedaan metode kerja pada bidang / Unit baru	ROO.26	1.03	12	01	9,00	Sekretaris Dinas PU	Bidang yang bergabung maupun berpindah dari OPD lain, sehingga pola kerja belum sepenuhnya selaras	Pelaksanaan administrasi kegiatan belum maksimal
24	Sistem kearsipan tidak terintegrasi	ROO.26	1.03	12	02	9,00	Sekretaris Dinas PU	Arsip disimpan dengan format dan metode yang berbeda-beda	Sulit mencari dokumen untuk kebutuhan pelayanan atau audit
25	Pengadaan barang berdasarkan kebutuhan lapangan yang bersifat mendesak, seringkali belum terakomodir dalam RKBMD	ROO.26	1.03	12	03	12,00	Sekretaris Dinas PU	Lemahnya pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang	Barang tidak sesuai kebutuhan, harga tidak wajar
26	Tenaga jasa penunjang tidak memiliki keterampilan sesuai kebutuhan teknis	ROO.26	1.03	12	04	9,00	Sekretaris Dinas PU	Rekrutmen dan evaluasi penyedia jasa tidak berbasis kompetensi	Terhambatnya pelaksanaan operasional OPD
27	Penggantian barang baru dengan barang bekas berkualitas rendah (FRA)	ROO.26	1.03	12	05	5,00	Sekretaris Dinas PU	Tidak ada pemeriksaan fisik menyeluruh saat penerimaan barang	Penurunan umur pakai aset, potensi kerugian daerah
28	Pencatatan perawatan fiktif pada kendaraan yang tidak dipelihara (FRA)	ROO.26	1.03	12	06	5,00	Sekretaris Dinas PU	Kolusi antara pihak bengkel dengan pemakai kendaraan dengan pihak bengkel	Kerusakan pada aset BMD
29	Perubahan format pelaporan keuangan yang tidak segera disosialisasikan	ROO.26	1.03	13	01	8,00	Sekretaris Dinas PU	SOP tidak diperbarui mengikuti perubahan regulasi	Dokumen pelaporan tidak sesuai ketentuan terbaru
30	Penyampaian SPJ dengan bukti fiktif agar pencairan dana tahap berikutnya lancar (FRA)	ROO.26	1.03	13	02	5,00	Sekretaris Dinas PU	Kurangnya pemeriksaan lapangan atas bukti pengeluaran	Dana digunakan tidak sesuai tujuan

Keterangan

Level Risiko	Besaran risiko	Warna
Sangat Tinggi	20 - 25	
Tinggi	16 - 19	
Sedang	12 - 15	
Rendah	6 - 11	
Sangat Rendah	1 - 5	

FORMULIR KERTAS KERJA
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2025							
Periode yang dinilai : RD 2025-2029							
Tujuan Strategis : Meningkatnya Kinerja infrastruktur							
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
N	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA							
	Terdapat 24 risiko Fraud pada Dinas Pekerjaan Umum, meliputi Risiko Benturan kepentingan = 8; Risiko Gratifikasi = 2; Risiko Penggelapan Dalam Jabatan = 1; Risiko Suap Menyuap = 1; Risiko Perbuatan Curang = 1; Risiko Perbuatan Merugikan Negara = 1;			Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembinaan dan Rapat pengendalian secara rutin, terutama di level eselon III selaku koordinator di setiap sub Urusan	Kepala Dinas PU	Januari - Desember 2026

N O	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF						
	a. komponen perencanaan kinerja : 1) Tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belum sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku; 2) Belum optimalnya perencanaan dengan kinerja yang ingin dicapai kepada seluruh pegawai di Dinas Pekerjaan Umum; 3) Dalam internalisasi kinerja pengambilan keputusan belum memperhatikan memanfaatkan analisis perbaikan kinerja; b. Belum optimalnya internalisasi SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai di lingkungan dan hasil Dinas Pekerjaan Umum; c. komponen pelaporan kinerja: 1) Belum optimalnya pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala oleh Pimpinan; 2) Belum optimalnya internalisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum kepada seluruh pegawai;	Evaluasi Indikator Kinerja sudah dilakukan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi Indikator Kinerja secara berkala dengan melibatkan bidang teknis	Kepala Dinas PU	Januari - Desember 2026

N O	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF						
	Lingkungan Pengendalian Belum Sepenuhnya Tepat; Identifikasi Risiko Kecurangan dan Kemitraan belum Optimal; Selera Kebijakan berdasarkan Sampling; Rencana atau Jadwal kegiatan Informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat; Keterlambatan penyusunan dan penetapan RTP	Kebijakan penyusunan RTP sudah dilaksanakan secara rutin tiap tahun	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan RTP sesuai ketentuan	Kepala Dinas PU	TW I Tahun 2026

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Penilaian : 2025 Periode yang dinilai : 2026 Tujuan Strategis : Meningkatnya Kinerja infrastruktur Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/T E	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase belum mencukupi kebutuhan penanganan kerusakan. Sedangkan pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan masih belum mampu mengurangi luas genangan	ROO.26.1.03.03.01	Pelaksanaan SID pada setiap lokasi penanganan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Survei lokasi dengan berkoordinasi ataupun mengikutsertakan pengusul/perangkat desa	Kepala Bidang Jalan dan Drainase	Bulan Januari - Maret 2026
2	Kurangnya jumlah Infrastruktur pengelolaan persampahan	ROO.26.1.03.05.01	DPA Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun dokumen DED TPST di Area Purwokerto	Bidang BGPBLPP	Triwulan I-IV
3	Terhambatnya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing akibat Cuaca ekstrem, lokasi hasil survey tidak sesuai usulan, tumpang tindih kewenangan	ROO.26.1.03.06.02	Pembentukanan tim pelaksana kegiatan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Rapat persiapan pengadaan barang jasa	Kepala Bidang SDAALAM	Bulan Januari-Maret 2026
4	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik dan penurunan kualitas pekerjaan jalan	ROO.26.1.03.08.01	Rapat Pra Construction Meeting (PCM)	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Rapat evaluasi pekerjaan fisik	Bidang Jalan dan Drainase	Triwulan I-IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/T E	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
5	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil dalam pelatihan / pembinaan Jasa konstruksi	ROO.26.1.03.10.01	Pembuatan jadwal pembinaan jasa konstruksi sesuai kebutuhan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Sosialisasi jadwal pembinaan jasa konstruksi	Kepala Bidang PRJK	TW 1 tahun 2026
6	Pengadaan barang berdasarkan kebutuhan lapangan yang bersifat mendesak, seringkali belum terakomodir dalam RKBMD	ROO.26.1.03.12.03	RKBMD	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Perubahan RKBMD sebelum perubahan APBD ditetapkan	Sekretaris Dinas PU	Triwulan I -IV

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : 2026
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kinerja infrastruktur
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Survei lokasi dengan berkoordinasi ataupun mengikutsertakan pengusul/perangkat desa	Survei lapangan dan rapat koordinasi	Kepala Bidang Jalan dan Drainase	Kepala Dinas PU; Pengusul / perangkat desa	Triwulan II dan IV Tahun 2026		
2	Menyusun dokumen DED TPST di Area Purwokerto	Rapat Koordinasi	Bidang BGPBLPP	Kepala Dinas PU	Triwulan II dan IV Tahun 2026		
3	Rapat persiapan pengadaan barang jasa	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang SDAALAM	Kepala Dinas PU	Triwulan II dan IV Tahun 2026		
4	Rapat evaluasi pekerjaan fisik	Rapat Koordinasi	Bidang Jalan dan Drainase	Kepala Dinas PU	Triwulan II dan IV Tahun 2026		
5	Sosialisasi jadwal pembinaan jasa konstruksi	Sosialisasi / banner / website / medsos	Kepala Bidang PRJK	Kepala Dinas PU; Tenaga Konstruksi	Triwulan II dan IV Tahun 2026		
6	Penyusunan Perubahan RKBMD sebelum perubahan APBD ditetapkan	Rapat Koordinasi	Sekretaris Dinas PU	Kepala Dinas PU	Triwulan II dan IV Tahun 2026		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2025
Periode yang dinilai : 2026
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kinerja infrastruktur
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Survei lokasi dengan berkoordinasi ataupun mengikutsertakan pengusul/perangkat desa	Survei lapangan dan rapat koordinasi	Kepala Bidang Jalan dan Drainase	Triwulan II dan IV Tahun 2026		
2	Menyusun dokumen DED TPST di Area Purwokerto	Rapat Koordinasi	Bidang BGPBLPP	Triwulan II dan IV Tahun 2026		
3	Rapat persiapan pengadaan barang jasa	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang SDAALAM	Triwulan II dan IV Tahun 2026		
4	Rapat evaluasi pekerjaan fisik	Rapat Koordinasi	Bidang Jalan dan Drainase	Triwulan II dan IV Tahun 2026		
5	Sosialisasi jadwal pembinaan jasa konstruksi	Sosialisasi / banner / website / medsos	Kepala Bidang PRJK	Triwulan II dan IV Tahun 2026		
6	Penyusunan Perubahan RKBMD sebelum perubahan APBD ditetapkan	Rapat Koordinasi	Sekretaris Dinas PU	Triwulan II dan IV Tahun 2026		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2025
Periode yang dinilai : 2026
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kinerja infrastruktur
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase belum mencukupi kebutuhan penanganan kerusakan. Sedangkan pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan masih belum mampu mengurangi luas genangan	ROO.26.1.03.03.01					Survei lokasi dengan berkoordinasi ataupun mengikutsertakan pengusul/perangkat desa	Bulan Januari - Maret 2026		
2	Kurangnya jumlah Infrastruktur pengelolaan persampahan	ROO.26.1.03.05.01					Menyusun dokumen DED TPST di Area Purwokerto	Triwulan I-IV		
3	Terhambatnya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing akibat Cuaca ekstrem, lokasi hasil survey tidak sesuai usulan, tumpang tindih kewenangan	ROO.26.1.03.06.02					Rapat persiapan pengadaan barang jasa	Bulan Januari-Maret 2026		
4	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik dan penurunan kualitas pekerjaan jalan	ROO.26.1.03.08.01					Rapat evaluasi pekerjaan fisik	Triwulan I-IV		
5	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil dalam pelatihan / pembinaan Jasa konstruksi	ROO.26.1.03.10.01					Sosialisasi jadwal pembinaan jasa konstruksi	TW 1 tahun 2026		
6	Pengadaan barang berdasarkan kebutuhan lapangan yang bersifat mendesak, seringkali belum terakomodir dalam RKBMD	ROO.26.1.03.12.03					Penyusunan Perubahan RKBMD sebelum perubahan APBD ditetapkan	Triwulan I -IV		